



**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
*INTEGRATED REPORTING***

Aprilia Damayanti^{1*}, I Gusti Ketut Agung Ulupui², Indah Muliasari³

¹²³Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana tata kelola perusahaan dapat memengaruhi terhadap peningkatan *integrated reporting*. Komite Audit, Direksi, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusi semuanya berperan sebagai faktor tersendiri dalam penelitian ini. Pelaporan terintegrasi berfungsi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan perusahaan tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2018 dan 2020. Tiga puluh delapan bisnis dipilih menggunakan strategi *purposive sampling*. Regresi linier berganda dalam SPSS 22 digunakan sebagai strategi statistik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa pelaporan terintegrasi dipengaruhi oleh dewan direksi dan komite audit, tetapi tidak dipengaruhi oleh komisaris independen dan kepemilikan institusional.

Kata Kunci: *Integrated Reporting*, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional

ABSTRACT

The focus of this study is on the possibility that enhanced corporate governance will lead to more accurate integrated reporting. The independent factors in this study include the presence of a Board of Directors, Independent Commissioners, Audit Committees, and Institutional Ownership. Integrated reporting will serve as the focal point of this investigation. Our secondary data comes from the annual reports of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2018 and 2020. Thirty-eight businesses were chosen using a purposive sample strategy. Multiple linear regression in SPSS 22 is utilized as the statistical strategy. Based on these findings, the study concluded that integrated reporting is influenced by the board of directors and audit committee, but not by independent commissioners and institutional ownership..

Keywords: *Integrated Reporting, Board of Directors, Independent Commissioners, Audit Committee, Institutional Ownership*

How to Cite:

Aprilia, D., Ulupui, I., G., K., A., & Muliasari, I., (2022). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Integrated Reporting*, Vol. 3, No. 3, hal 744-765.

PENDAHULUAN

Ekspektasi pemangku kepentingan terhadap pelaporan perusahaan telah meningkat sebagai tanggapan terhadap perubahan besar dalam cara bisnis beroperasi, seperti globalisasi, krisis keuangan, dan reformasi peraturan (Busco, Malafronte, Pereira & Starita, 2019). Pada mulanya, fokus perusahaan hanya tertuju pada publikasi dan penyajian laporan keuangan dengan menyajikan informasi-informasi keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kebutuhan pengguna informasi-informasi yang hanya memerlukan informasi yang mendasarkan pada informasi-informasi keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Kustiani, 2017). Namun, pemangku kepentingan dan pemegang saham akan mengalami ketidakpuasan penerimaan informasi jika pengambilan keputusan dibuat hanya dengan menggunakan data dari informasi-informasi keuangan, karena data ini tidak cukup relevan untuk digunakan.

Jensen dan Meckling (1976) memaparkan gagasan bahwa perusahaan merupakan *nexus of contract* sehingga dalam suatu perusahaan terdapat banyak pihak yang mempunyai kepentingan akan keberlangsungan perusahaan. Dengan demikian, laporan suatu perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham dan memenuhi kebutuhan informasi keuangan bagi pemegang saham sebagai suatu sumber pendanaan keuangan perusahaan, namun saat ini laporan perusahaan juga dituntut untuk menginformasikan dan mengomunikasikan kepada *stakeholder*/pemangku kepentingan mengenai kondisi terdapat dalam perusahaan secara keseluruhan baik dari sisi lingkungan alam ataupun sisi lingkungan sosial. Oleh karena itu, pengukuran yang terdapat dalam perusahaan tidak hanya ukuran moneter/keuangan tetapi dipertimbangkan pula pengukuran aspek lain yaitu ukuran non keuangan. Laporan non-keuangan perusahaan muncul sebagai akibat dari tekanan tersebut. Perkembangan laporan non keuangan dimulai dengan adanya pengungkapan laporan tanggung jawab sosial (Ahmad & Sari, 2017). Seiring dengan peningkatan kebutuhan *stakeholder*, maka laporan perusahaan dituntut untuk tidak hanya memberikan informasi terkait lingkungan sosial dan lingkungan alam, namun menyediakan informasi mengenai pembangunan berkelanjutan atau *sustainability report*.

Menurut Utami (2016), perusahaan masih mempublikasikan pengungkapan keuangan dan non-keuangan secara terpisah. Hal tersebut menyebabkan pemahaman pembaca laporan atau pihak eksternal dan pemangku kepentingan menjadi berkurang karena tidak terfasilitasi dengan baik, sehingga mengakibatkan berkurangnya kebermanfaatan informasi yang diungkapkan kepada publik. Atas dasar ini, investor dan pihak berkepentingan lainnya mengharapkan adanya penyajian pelaporan secara komprehensif tentang gambaran keseluruhan tentang posisi perusahaan di pasar, termasuk kemampuannya untuk menciptakan nilai dan keadaan, peluang, dan bahaya yang akan dihadapinya dalam waktu dekat, menengah, dan jauh di masa depan. Kondisi tersebut mencetuskan suatu system pelaporan baru yang terintegrasi yang dinamain dengan istilah *Integrated Reporting*.

Definisi pelaporan terintegrasi, "pelaporan terintegrasi adalah serangkaian proses yang dapat membuat laporan terintegrasi tentang komunikasi ringkas tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek perusahaan dalam konteks lingkungan eksternal entitas perusahaan, yang mengarah pada penciptaan nilai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang" (IIRC, 2013). Pentingnya implementasi *integrated reporting* dalam sistem pelaporan entitas perusahaan dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya terlihat dari pengungkapan prospek entitas perusahaan. Informasi yang tersaji dalam *integrated reporting* merupakan informasi yang mengungkapkan informasi yang berorientasi ke depan (prospektif) dengan mengacu pada rencana saat ini dan rencana di masa depan sehingga *integrated reporting* dapat memberikan informasi mengenai prospek masa depan perusahaan. Lain halnya dengan laporan tahunan terdahulu yang bersifat retrospektif dan hanya mengacu pada

informasi dan laporan keuangan masa lalu, sehingga tidak memberikan informasi mengenai prospek perusahaan pada masa mendatang. (Kılıç & Kuzey, 2018)

Menurut Utami (2016), *integrated reporting* masih diungkapkan secara sukarela atau *voluntary*, sehingga tidak seluruh negara di dunia mewajibkan pengungkapan atas *integrated reporting*. Salah satunya negara Indonesia masih mengungkapkan *integrated reporting* secara sukarela dan belum mewajibkan entitas perusahaan untuk melakukan penerapan *integrated reporting* secara penuh (Qashash et al., 2019; Prawesti, 2019). Selain itu, implementasi pelaporan terintegrasi belum diatur oleh peraturan Indonesia (Qashash et al., 2019). Karena *integrated reporting* merupakan konsep pelaporan yang relatif baru, sehingga penelitian terkait dengan *integrated reporting* masih minim atau belum banyak dilakukan (Ahmad & Sari, 2017; Permata dkk., 2020; Utamie, 2021; Kurnianto et al., 2020), sebagaimana tertuang dalam kajian tersebut di atas.

Pengungkapan data yang relevan dan transparan dalam laporan tahunan merupakan landasan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam pengungkapan pelaporan terintegrasi karena manajemen memiliki suara yang signifikan dalam apa yang ada dan tidak termasuk dalam laporan tahunan perusahaan (Mawardani & Harymawan, 2021). Menurut Permata et al. (2020), penelitian yang menyelidiki hubungan antara tata kelola perusahaan dan penggunaan pelaporan terintegrasi masih minim dilakukan atau ada kelangkaan penelitian yang melihat bagaimana tata kelola perusahaan mempengaruhi pelaporan terintegrasi. Selain masih minimnya penelitian mengenai topik tersebut, temuan penelitian masih menunjukkan hasil yang beragam atau kontradiksi antar penelitian terdahulu.

Terdapat berbagai faktor di luar proses pelaporan yang berpotensi mempengaruhi pelaporan terintegrasi. Penelitian ini berfokus pada empat faktor yang diduga berpengaruh pada *integrated reporting*: direksi, komisaris independen, komite audit, dan *institutional ownership*. Dewan direksi sebagai salah satu hal yang dapat memengaruhi pengungkapan informasi melalui pelaporan terintegrasi. Pengelolaan perusahaan dan penentuan strategi ditetapkan oleh dewan direksi, sehingga semakin tinggi kuantitas dewan direksi maka akan semakin luas pengungkapan informasi perusahaan (Hapsari et al., 2019). Baik Qashash et al. (2019) maupun Wijaya & Agustina (2021) mengungkapkan korelasi yang menguntungkan dan signifikan secara statistik antara direksi dan pelaporan terintegrasi. Mujiani dan Jayanti (2021) dan Situmorang dan Hadiprajitno (2016), di sisi lain sampai pada kesimpulan yang berlawanan, tidak menemukan korelasi antara dewan direksi dan pelaporan terpadu dalam studi masing-masing. Hal ini disebabkan oleh fokus utama direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang menyebabkan dewan mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja non-keuangan, seperti pengungkapan kinerja non-keuangan (Situmorang & Hadiprajitno, 2016).

Komisaris independen merupakan faktor potensial dalam pelaporan terintegrasi. Melalui tugas utamanya sebagai fungsi pengawasan dalam suatu perusahaan, komisaris independen dimaksudkan untuk mencegah manajer terlibat dalam perilaku oportunistik sehingga mendorong manajer melakukan pengungkapan pelaporan perusahaan (Lock & Seele, 2016). Komisaris independen memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial pada pelaporan terintegrasi, menurut studi oleh Wijaya & Agustina (2021) dan Vitolla et al (2019). Pengujian hipotesis tidak menemukan pengaruh komisaris independen terhadap pelaporan terintegrasi, menurut riset oleh Adiwibowo & Ifnapiya (2020) dan Qashash et al. (2019). Sebab, proporsi komisaris independen lebih sedikit daripada anggota dewan komisaris mengakibatkan penurunan efektifitas proses pengawasan sehingga berdampak pada luasnya pengungkapan informasi (Ahmad & Sari, 2017).

Beralih ke faktor lainnya yaitu komite audit. Eksistensi komite audit di sebuah organisasi dinilai mampu menghadirkan tingkat pengawasan yang lebih efektif, sehingga memberikan dorongan untuk memingkatkan pengungkapan informasi secara menyeluruh. Kustiani (2017), Ahmad & Sari (2017), dan Kurnianto et al (2020), semuanya menemukan bahwa proksi komite audit untuk tata kelola perusahaan yang baik memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap pelaporan terintegrasi. Beberapa penelitian telah menemukan hasil yang bertentangan ketika menguji hipotesis tentang hubungan antara komite audit dan pelaporan terintegrasi. Misalnya, Adiwibowo dan Ifnapiya (2020), Utamie dan kolega (2021), dan Qashash dan kolega (2019) semuanya menyimpulkan bahwa hubungan yang dihipotesiskan tidak terbukti. Hal tersebut disebabkan karena sifat tanggung jawab komite audit untuk menganalisis informasi keuangan terkait dengan informasi yang bersifat wajib, sehingga tidak memberikan banyak waktu atau sumber daya untuk menganalisis pengungkapan informasi secara sukarela (Qashash et al., 2019).

Dalam sebuah entitas perusahaan, kepemilikan institusional dinilai mampu dalam menjalankan mekanisme pengawasan yang efektif dalam entitas perusahaan. Kepemilikan institusional dapat berdampak pada pelaporan terintegrasi, seperti yang ditunjukkan oleh Wijaya & Agustina (2021) dan Permata et al. (2020). Meskipun terdapat penelitian yang menemukan hubungan antara kepemilikan institusional dan pelaporan terintegrasi, penelitian lain bertentangan dengan kesimpulan tersebut. Misalnya, Adiwibowo & Ifnapiya (2020), Qashash et al. (2019), dan Sundari et al. (2020) semuanya tidak menemukan hubungan antara kepemilikan institusional dan pelaporan terintegrasi. Sebab, lembaga tersebut lebih mengedepankan maksimalisasi laba dibandingkan dengan keterbukaan informasi secara komprehensif dan belum menjadikan *integrated reporting* sebagai kriteria investasi (Adiwibowo & Ifnapiya, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti melihat adanya *research gap* terkait dengan masih minimnya penelitian *integrated reporting* dan masih terdapat hasil yang inkonsistensi mengenai dampak tata kelola perusahaan terhadap *integrated reporting*. Karena itu, peneliti merencanakan penelitian berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Integrated Reporting*”

TINJAUAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa gagasan agensi terjadi ketika prinsipal dan agen mengadakan hubungan kontraktual. Hal ini bermula karena ketidakmampuan prinsipal dalam mengelola perusahaan secara pribadi, sehingga menunjuk agen untuk bertugas sebagai pengelola perusahaan sesuai dengan kontrak kerja (Yunizar & Rahardjo, 2014). Dari kontrak tersebut, pihak pengelola perusahaan sebagai *agent* bertugas untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan perusahaan. Pengelolaan dan kepemilikan perusahaan yang terpisah menyebabkan adanya konflik kepentingan diantara 2 pihak sehingga menimbulkan permasalahan yang disebut dengan masalah agensi (Martsila & Meiranto, 2013).

Contracting, revealing, corporate governance, information intermediaries, dan corporate control contest adalah strategi mengatasi dan menyelesaikan masalah keagenan, sebagaimana dibahas oleh Healy et al dalam Wijaya & Agustina (2021). Sebagai alternatif untuk pengungkapan langsung dari perusahaan, *information intermediaries* dapat membantu mengatasi masalah agensi. Pelaporan terintegrasi dapat memaut investor baru, sehingga perusahaan dapat meminimalisir asimetri informasi dan meningkatkan nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan yang terintegrasi. (Prawesti, 2019).

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan, sebagaimana dikemukakan oleh Freeman (1984), mendefinisikan "pemangku kepentingan" sebagai "pihak yang berkepentingan" (individu atau kelompok) yang mungkin terpengaruh dan dipengaruhi oleh tindakan bisnis terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Keberlangsungan usaha dan pencapaian tujuan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh pemegang saham atau *shareholders* namun dipengaruhi juga oleh pihak-pihak berkepentingan atau *stakeholders*. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Freeman pada tahun 1984 yang mengatakan bahwa organisasi bisnis harus mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan dari *stakeholders* lain dalam suatu pengambilan keputusan strategis.

Perusahaan perlu menyampaikan dan mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan kepada *stakeholder*, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* dalam membuat suatu keputusan (Prawesti, 2019). Jika sebuah perusahaan benar-benar peduli dengan pemangku kepentingannya, maka akan melampaui kewajiban untuk mengungkapkan informasi penting tentang operasinya, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal tersebut berguna untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya dan kebutuhan informasi yang diinginkan *stakeholder* (Bags, 2017).

Integrated Reporting

Gagasan "pelaporan terintegrasi," seperti yang lebih umum dikenal, diciptakan oleh *International Integrated Reporting Council* (IIRC). Definisi pelaporan terintegrasi, "pelaporan terintegrasi adalah serangkaian proses yang dapat membuat laporan terintegrasi tentang komunikasi ringkas tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek perusahaan dalam konteks lingkungan eksternal entitas perusahaan, yang mengarah pada penciptaan nilai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang" (IIRC, 2013). Tujuan pelaporan terpadu adalah untuk menunjukkan dan menginformasikan hubungan antara data keuangan dan non-keuangan untuk mendorong pengembangan dan menciptakan nilai bisnis yang terlihat oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Kılıç & Kuzey, 2018). *International Integrated Reporting Council* (IIRC) mengembangkan *Integrated Reporting Framework* untuk menjadi tolok ukur internasional untuk pelaporan terintegrasi (Ahmad & Sari, 2017). Prinsip dan elemen konten yang termasuk dalam kerangka IR dapat dijadikan sebagai panduan isi laporan perusahaan yang terintegrasi secara menyeluruh.

Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat aturan yang menetapkan peran dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis dan operasional perusahaan, termasuk pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, dan pemangku kepentingan eksternal dan internal lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Arifin dalam Mulyadi (2016), tujuan akhir dari tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk meningkatkan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dewan komisaris, direksi, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan komite audit adalah delapan mekanisme tata kelola perusahaan yang berbeda yang diidentifikasi oleh Melanie & Dewi (2019).

Dewan Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/PJOK.03/2014, direksi diberikan wewenang dan kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Menurut pasal 2 POJK No. 33/PJOK.03/2014, sebuah korporasi harus memiliki setidaknya dua anggota direksi, salah satunya harus menjadi direktur utama. Menurut Pedoman Umum

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, ukuran dewan direksi perusahaan harus mencerminkan kompleksitas bisnis dan kebutuhan untuk efektifitas proses pengambilan keputusan tertentu. Sehingga penambahan direktur harus sesuai dengan peningkatan kompleksitas bisnis (Daromes & Jao, 2020). Jumlah dewan direksi yang lebih besar berdampak terhadap pengelolaan korporasi yang semakin efektif sehingga korporasi akan lebih luas dalam mengungkapkan informasi dan melakukan komunikasi kepada *shareholder* dan *stakeholder* sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilai melalui *integrated reporting* (Situmorang & Hadiprajitno, 2016).

Komisaris Independen

Menurut Peraturan Bapepam No. Kep 29/PM/2004, dikatakan sebagai "komisaris independen", seorang komisaris harus tidak terafiliasi dengan perusahaan, komisarisnya, dewan direksinya, atau pemegang saham utamanya; selain itu juga tidak dapat memegang saham apa pun di perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak dapat terlibat dalam operasi perusahaan dengan cara apa pun. Sekurang-kurangnya 30 persen dari dewan komisaris perusahaan harus terdiri dari komisaris independen, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan OJK Nomor 57/PJOK 04/2017 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proporsi komisaris independen yang lebih besar daripada struktur dewan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sebab kehadiran komisaris independen dapat memperkuat ruang lingkup dan efektifitas pengawasan dan pemantauan, sehingga mendorong korporasi melakukan pengungkapan pelaporan secara terbuka dan terintegrasi.

Komite Audit

Komite audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/PJOK.04/2015 dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris, dan tujuannya adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menjalankan fungsinya, khususnya di bidang pengawasan. Pembentukan komite audit dilakukan oleh entitas perusahaan agar perusahaan dapat melakukan peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga kinerja manajemen menjadi efektif dan efisien serta dapat membantu meningkatkan dalam pengungkapan informasi secara komprehensif dan transparan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau *stakeholder*. Dengan demikian, entitas perusahaan dapat mendorong publikasi *integrated reporting* sehingga dapat mewujudkan dan menumbuhkan nilai perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Ketika organisasi lain memiliki saham yang signifikan dalam sebuah perusahaan, ini dikenal sebagai "kepemilikan institusional," seperti yang dijelaskan oleh Novaridha et al. (2017). Menurut teori keagenan, semakin tinggi jumlah pemegang saham besar, maka manajemen akan semakin diawasi (Wijaya & Agustina, 2021). Pentingnya peran yang dimiliki oleh pihak investor institusional menjadikan perusahaan dapat mengurangi konflik keagenan sehingga dapat mencegah perilaku oportunistik yang terjadi dalam perusahaan dan membuat pengambilan keputusan oleh pihak manajemen menjadi lebih efektif (Ahmad & Sari, 2017). Dengan demikian, adanya kepemilikan institusional dapat memberikan dorongan agar perusahaan dapat mengungkapkan dan menyajikan pelaporan yang lebih komprehensif dan transparan terkait operasional perusahaan sehingga dapat digunakan oleh seluruh *stakeholders* melalui *integrated reporting* (Sundari et al., 2020).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Integrated Reporting*

Peningkatan jumlah pengungkapan dapat terjadi karena memiliki dewan direksi yang lebih besar, seperti yang ditunjukkan oleh Feng et al. (2017). Hal tersebut disebabkan karena besarnya ukuran dewan direksi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan manajerial sehingga berdampak pada peningkatan pengelolaan perusahaan. Meningkatnya pengelolaan perusahaan mengakibatkan pengungkapan informasi dan komunikasi kepada *shareholder* dan *stakeholder* semakin luas sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilai atau *value* sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pelaporan terpadu (Situmorang & Hadiprajitno, 2016). Selain itu, dewan dengan jumlah anggota yang lebih besar lebih cenderung mempertimbangkan opini publik ketika membuat keputusan bisnis daripada dewan dengan jumlah anggota yang lebih rendah (Abeysekera, 2010). Dengan demikian, direksi yang lebih besar dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan tindakan dan operasional perusahaan untuk kepentingan pemangku kepentingan, seperti pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan, karena meningkatnya fokus ke bidang-bidang tersebut (Suttipun & Bomlai, 2019).

Berbagai penelitian termasuk yang dilakukan oleh Wijaya & Agustina (2021), Qashash et al. (2019), dan Mawardani & Harymawan (2021), telah menunjukkan bahwa dewan yang lebih besar merupakan indikator tata kelola perusahaan yang baik, yang pada temuannya memiliki efek positif dan signifikan pada pelaporan terintegrasi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti mengajukan hipotesis berikut.

H1: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap *integrated reporting*

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Integrated Reporting*

Fungsi utama komisaris independen yaitu melakukan fungsi pengawasan dan *monitoring* yang bersifat independen terhadap manajemen perusahaan (Dewi et al., 2018). Menurut Hardikasari dalam Dewi et al. (2018), tingginya jumlah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan pilihan yang dibuat oleh dewan komisaris, sehingga dewan komisaris dapat membela seluruh pemangku kepentingan perusahaan, baik mayoritas maupun minoritas. Untuk keberhasilan pengawasan dan pemantauan kinerja manajemen serta penciptaan nilai jangka pendek, menengah, dan panjang bagi organisasi. Martsila dan Meiranto (2013) mengemukakan bahwa dewan komisaris independen yang lebih besar dan beragam bisa memastikan *monitoring* menjadi lebih efektif terhadap kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan manajemen sehingga meningkatkan kinerja dan nilai korporasi. Keberadaan komisaris independen dalam tata kelola perusahaan dapat menekan kapasitas untuk mempublikasikan laporan secara umum sehubungan dengan pencapaian tujuan GCG (Wijaya & Agustina, 2021). Oleh karena itu, proporsi komisaris independen yang lebih besar dalam struktur dewan dikaitkan dengan peningkatan pengungkapan pelaporan bisnis terintegrasi (Ahmad & Sari, 2017).

Menurut studi Vitolla et al. (2019) dan Wijaya & Agustina (2021), *integrated reporting* dipengaruhi secara signifikan oleh susunan komisaris independen. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti mengajukan hipotesis berikut.

H2: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *integrated reporting*

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Integrated Reporting*

Berdasarkan teori keagenan atau teori agensi, komite audit dapat mengurangi adanya masalah keagenan atau masalah kepentingan antara kedua belah pihak yaitu pihak manajemen dengan pihak *principal* melalui mekanisme pengawasan dan *monitoring*, sehingga mendorong adanya peningkatan pengungkapan informasi secara komprehensif dan transparan. Hal

tersebut mendorong perusahaan dalam mengungkapkan informasi sesuai dengan elemen *integrated reporting*. Menurut Ntim dalam Mardiah (2020), komite audit dapat menjamin pengungkapan integritas informasi dalam laporan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup tanggung jawab komite audit memiliki pengaruh langsung pada luasnya praktik transparansi perusahaan.

Telah ditemukan dalam sejumlah penelitian, antara lain oleh Ahmad dan Sari (2017), Yulyan dan kolega (2021), Kurnianto dan kolega (2020), serta Wijaya dan Agustina (2021), bahwa peran komite audit sebagai proksi tata kelola perusahaan yang baik memiliki dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap *integrated reporting*. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti mengajukan hipotesis berikut.

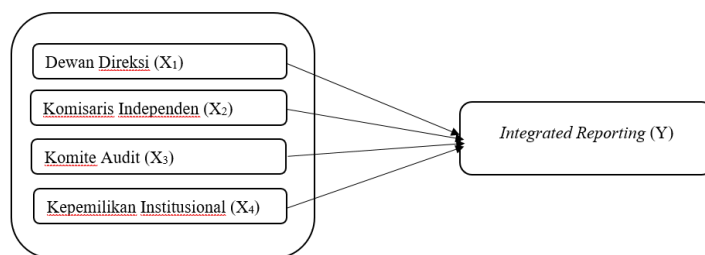
H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap *integrated reporting*

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Integrated Reporting*

Karena sumber daya yang lebih tinggi, investor institusional dipandang mampu mengatur pihak manajer melalui prosedur pengawasan yang efektif. Semakin tinggi proporsi saham pihak institusional, maka pengawasan terhadap pihak manajemen akan meningkat (Wijaya & Agustina, 2021). Ketika sebuah perusahaan memiliki investor institusional yang signifikan, maka lebih mampu menghilangkan konflik agensi antara manajemen dan prinsipal. Hal ini karena investor institusi memainkan peran kunci dalam tata kelola perusahaan, membatasi kemampuan manajemen untuk mengambil tindakan oportunistik (Ahmad & Sari, 2017). Dengan demikian, dengan adanya kepemilikan institusional maka dapat memberikan dorongan agar perusahaan dapat mengungkapkan dan menyajikan pelaporan yang lebih komprehensif dan transparan terkait operasional perusahaan sehingga dapat digunakan oleh seluruh *stakeholders* (Sundari et al., 2020).

Kepemilikan institusional telah terbukti memiliki efek yang menguntungkan pada pelaporan terintegrasi dalam banyak penelitian, termasuk oleh Permata et al. (2020) dan Wijaya & Agustina (2021). Hipotesis dikembangkan oleh peneliti berdasarkan temuan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut.

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *integrated reporting*



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Peneliti menggunakan variabel dewan direksi sebagai X_1 , komisaris independen sebagai X_2 , komite audit sebagai X_3 , dan kepemilikan institusional sebagai X_4 . Variabel *integrated reporting* digunakan oleh peneliti sebagai variabel dependen.

METODE PENELITIAN

Perusahaan pertambangan Indonesia yang terdaftar secara publik antara 2018 dan 2020 berfungsi sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif analisis

regresi linier berganda. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan tambang yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang terlibat dalam pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara 2018 dan 2020 merupakan populasi untuk penelitian ini. Sampel perusahaan terpilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*. Berikut merupakan kriteria penentuan sampel pada penelitian ini:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020
2. Perusahaan pertambangan yang laporan tahunannya periode 2018-2020 dapat diakses
3. Perusahaan pertambangan yang laporan tahunannya tidak berupa draft (lengkap)

Tabel 1. Seleksi Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020	36
2	Perusahaan pertambangan yang laporan tahunan tahun 2018-2020 tidak dapat diakses	(7)
3	Perusahaan pertambangan yang laporan tahunannya berupa draft (tidak lengkap)	(1)
Jumlah Sampel		28
Jumlah Sampel Selama 3 tahun (2018-2020)		84

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2022)

Penelitian ini mengkaji lima faktor: satu dependen (*integrated reporting*), empat independen (direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusi). Berikut pengukuran masing-masing variabel

Definisi pelaporan terintegrasi, "pelaporan terintegrasi adalah serangkaian proses yang dapat membuat laporan terintegrasi tentang komunikasi ringkas tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek perusahaan dalam konteks lingkungan eksternal entitas perusahaan, yang mengarah pada penciptaan nilai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang" (IIRC, 2013). *Research* ini menggunakan pendekatan perhitungan kata pada *annual report* perusahaan yang berdasarkan item-item pengungkapan dari elemen konten *integrated reporting framework* sebagaimana telah digunakan oleh peneliti sebelumnya (Mawardani & Harymawan, 2021; Suttipun & Bomlai, 2019). Metode tersebut digunakan karena dapat dengan mudah diklasifikasikan dan tidak membutuhkan penilaian subjektif dari peneliti (Gamarschlag et al., 2011). Item-item *integrated reporting* berjumlah 46 item dan terdapat 93 kata kunci. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam pengukuran *integrated*

$$IR = Ln (OR + GV + BM + RO + SR + PF + OL)$$

Keterangan:

OR : *Organizational overview and external environment*

GV : *Governance*

BM : *Business Model*

RO : *Risk and Opportunity*

SR : *Strategy and resource allocation*

PF : *Performance*

OL : *Outlook*

reporting:

Dewan Direksi adalah badan pengatur perusahaan, yang bertugas untuk membuat semua keputusan strategis dan operasional (Rahmawati, I.A., Rikumahu, Brady., dan Dillak, 2017).

$$\text{Ukuran dewan direksi} = \sum \text{proporsi dewan direksi}$$

Salah satu faktor dalam menentukan jumlah anggota dewan adalah ukuran dewan perusahaan saat ini. Daromes dan Jao (2020), Mawardani dan Harymawan (2021), Qashash et al. (2019), Suttipun dan Bomlai (2019) menggunakan pengukuran seperti ini. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam pengukuran:

Komisaris independen tidak terafiliasi dengan perusahaan, direksi, atau pemegang saham utama, selain itu juga tidak memegang saham apa pun di perusahaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan tidak dapat terlibat dalam operasi perusahaan dengan cara apa pun. Proporsi komisaris independen dihitung dengan membagi jumlah total komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris secara keseluruhan. Faktor komisaris independen diukur berdasarkan kajian Ahmad & Sari (2017), Eksandy (2018), Hartono & Nugrahanti (2014), Mandalika et al (2020), dan Yunizar & Rahardjo (2014). Berikut adalah rumus yang digunakan dalam pengukuran:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{proporsi komisaris independen}}{\sum \text{proporsi dewan komisaris}}$$

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan melaporkan tanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris memenuhi kewajiban pengawasannya. Salah satu kriteria untuk menilai komite audit adalah ukurannya. Pengukuran tersebut sebagaimana penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ahmad & Sari (2017), Hartono & Nugrahanti (2014), Melania & Dewi (2014) dan Utamie (2021). Berikut adalah rumus yang digunakan dalam pengukuran:

$$\text{Ukuran komite audit} = \sum \text{proporsi komite audit}$$

Kepemilikan institusional perusahaan adalah persentase sahamnya yang dimiliki oleh lembaga keuangan, lembaga pemerintah, dan entitas lain pada akhir tahun (Poluan & Nugroho, 2015). Persentase kepemilikan yang dimiliki oleh institusi dapat ditentukan dengan membagi jumlah saham yang dimiliki dengan jumlah total saham yang beredar. Ahmad & Sari (2017), Sundari et al. (2020), Wijaya & Agustina (2021) dan Novaridha (2017) melakukan pengukuran tersebut. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam pengukuran:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{proporsi saham yang dimiliki institusi}}{\text{proporsi saham biasa}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, terpilih 84 data selama periode tiga tahun dari laporan tahunan 28 perusahaan pertambangan yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* (2018-2020). Direksi (DK), komisaris independen (KI), komite audit (KA), dan *institutional ownership* (KINS) menjadi variabel independen, dengan *integrated reporting* (IR) sebagai variabel dependen (Y).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IR	84	7,19	9,88	8,9221	,50819
DK	84	2,00	11,00	4,5952	1,72242
KI	84	,25	,67	,4130	,09915
KA	84	3,00	5,00	3,4524	,64760
KIN	84	,16	,98	,5968	,20960
Valid N (listwise)	84				

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2022)

Pada tabel nomor 2, uji statistik deskriptif variabel ukuran direksi (X1) menghasilkan rata-rata 4,5952 atau 5 individu dan standar deviasi 1,72242. Pada tahun 2020, PT Bumi Resources, Tbk akan memiliki nilai variabel direksi maksimum yaitu 11,0. Pada tahun 2019 dan 2020, PT Capitalinc Investment Tbk memiliki nilai variabel direksi minimum yaitu 2,0.

Dalam hal ini, proporsi rata-rata dewan komisaris independen (X2) sebesar 0,4130 atau memiliki 41% komisaris independen dari total dewan komisaris. Standar deviasi untuk komisaris independen adalah 0,09915. Nilai maksimum variabel komisaris independen pada 0,67 dipunyai oleh PT Mitra Investindo Tbk pada 2019 & 2020, serta dipunyai oleh PT TBS Energi Utama Tbk pada 2020. PT. Adaro Energy Tbk (2018), PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (2018), dan PT Super Energy Tbk (2020) mempunyai nilai minimum pada 0,25.

Beralih ke variabel ketiga, "komite audit," terlihat bahwa nilai rata-ratanya adalah 3,4524 atau 4 individu, dengan standar deviasi 0,64760. Nilai maksimum variabel ini adalah 5,0 dipunyai oleh PT. Indika Energy Tbk (2020), PT. Adaro Energy Tbk (2018 & 2020), PT. Capitalinc Investment Tbk (2020), PT. Elnusa Tbk (2020), PT. Harum Energy Tbk (2020), dan PT. Petrosea Tbk (2020). Nilai minimum variabel ini adalah 3,0 yang dipunyai oleh PT. Apexindo Pratama Duta Tbk (2018-2020), PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (2018-2020), PT. Atlas Resources Tbk (2018-2020), PT. Baramulti Susessarana Tbk (2018-2020), PT. Darma Henwa Tbk (2018-2020), PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk (2018-2020), PT. Elnusa Tbk (2018), PT. Energi Mega Persada Tbk (2018-2020), PT. Alfa Energi Investama Tbk (2018-2020), PT. Harum Energy Tbk (2018-2019), PT. Resources Alam Indonesia Tbk (2018-2019), PT. Mitrabara Adiperdana Tbk (2018-2019), PT. Medco Energi Internasional Tbk (2018-2020), PT. Mitra Investindo Tbk (2018-2020), PT. Golden Eagle Energy Tbk (2018-2020), PT. Super Energy Tbk (2018-2020), PT. Capitalinc Investment Tbk (2018-2019), PT. Samindo Resources Tbk (2018-2020), PT. Petrosea Tbk (2018-2019), dan PT. TBS Energi Utama Tbk (2018-2020).

Dengan mean/rata-rata 0,5968 dan standar deviasi 0,20960, pada X4 yaitu kepemilikan institusional. Nilai tertinggi sebesar 0,98 dipunyai oleh PT. Super Energy Tbk

(2020). Sementara nilai terendah variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 0,16 dimiliki oleh PT. Alfa Energi Investama Tbk (2019 & 2020).

Variabel *Integrated Reporting* (Y) memiliki nilai mean sebesar 8,9221 dan standar deviasi sebesar 0,50819. Nilai tertinggi sebesar 9,88 yang dipunyai oleh PT. Bukit Asam Tbk (2019) dan nilai terendah sebesar 7,19 dipunyai oleh PT. Mitra Investindo Tbk (2020).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,43035207
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,076
	Positive	,076
	Negative	-,050
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Tabel 3 menunjukkan hasil uji normalitas, dan dapat disimpulkan bahwa Asymp.Sig = 0,200. Nilai 0,200 lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DK	.910	1.098
	KI	.789	1.267
	KA	.896	1.116
	KIN	.788	1.270

a. Dependent Variable: IR

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan pada Tabel nomor 4. Nilai VIF dari setiap variabel bebas kurang dari 10 dan nilai *tolerance* dari setiap variabel bebas lebih dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ada masalah multikolinearitas dalam persamaan regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,532 ^a	,283	,247	,44111	1,933

a. Predictors: (Constant), KIN, DK, KA, KI

b. Dependent Variable: IR

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Analisis autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,933, seperti terlihat pada tabel 5. Dengan 84 sampel dan 4 variabel independen, tabel Durbin-Watson menghasilkan nilai $dL = 1,5472$, $dU = 1,7462$, dan $4-dU = 2,2538$. Sesuai dengan tabel Durbin-Watson sebelumnya, nilai DW 1,933 lebih tinggi dari nilai $dU = 1,7462$ dan lebih rendah dari nilai $dW = 2,2538$. Dengan demikian data mengungkapkan $dU < d < 4-dU$ atau $1,7462 < 1,933 < 2,2538$ yang menyiratkan bahwa dalam *research* ini tidak ada autokorelasi yang terjadi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8,054	2,828		-2,848	,006
	DK	-,098	,168	-,067	-,585	,560
	KI	4,921	3,134	,192	1,570	,120
	KA	,447	,450	,114	,993	,324
	KIN	2,819	1,484	,233	1,899	,061

a. Dependent Variable: LN2UI

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Tabel 6 menampilkan hasil uji heteroskedastisitas; masing-masing variabel independen mempunyai nilai Sig lebih tinggi daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen penelitian tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7,762	,496		15,647	,000
	DK	,098	,029	,332	3,320	,001
	KI	,167	,550	,033	,303	,762
	KA	,240	,079	,306	3,036	,003
	KIN	-,311	,260	-,128	-1,197	,235

a. Dependent Variable: IR

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Data dalam tabel 7 dapat digunakan untuk mendapatkan persamaan berikut untuk regresi linier berganda.

$$IR = 7,762 + 0,098DK_{it} + 0,167KI_{it} + 0,240KA_{it} - 0,311KINS_{it} + \varepsilon$$

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Tabel 8. Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,064	4	1,516	7,791	,000 ^b
	Residual	15,372	79	,195		
	Total	21,436	83			

a. Dependent Variable: IR

b. Predictors: (Constant), KIN, DK, KA, KI

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Uji kelayakan model menghasilkan nilai Sig 0,000, seperti terlihat pada Tabel 8. Model regresi penelitian ini dianggap layak karena ambang signifikansi ditetapkan pada $0,000 < 0,05$.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,532 ^a	,283	,247	,44111	1,933

a. Predictors: (Constant), KIN, DK, KA, KI

b. Dependent Variable: IR

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang diberikan pada tabel 9 di atas, diperoleh hasil *Adjusted R Square* dalam penelitian ini pada 0,247 atau 24,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 24,7% dari kontribusi variabel dependent yang dapat diuraikan oleh variabel independent; 75,3% lainnya kemungkinan besar disebabkan oleh penyebab lain yang tidak terkait dengan penelitian ini.

Uji Hipotesis

Tabel 10. Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,762	,496		15,647	,000
	DK	,098	,029	,332	3,320	,001
	KI	,167	,550	,033	,303	,762
	KA	,240	,079	,306	3,036	,003
	KIN	-,311	,260	-,128	-1,197	,235

a. Dependent Variable: IR

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Tabel 10 menunjukkan hasil uji hipotesis, dimana hipotesis berikut dapat disimpulkan:

1. Nilai Prob. dewan direksi (DK) kurang dari nilai Sig ($0,001 < 0,05$), sehingga hipotesis-1 “dewan direksi berpengaruh positif terhadap *integrated reporting*” **diterima**.
2. Nilai Prob. komisaris independen (KI) lebih tinggi dari nilai Sig ($0,762 > 0,05$), sehingga hipotesis-2 “komisaris independen berpengaruh positif terhadap *integrated reporting*” **tidak diterima**.
3. Nilai Prob. komite audit (KI) kurang dari nilai Sig ($0,003 < 0,05$), sehingga hipotesis-3 “komite audit berpengaruh positif terhadap *integrated reporting*” **diterima**.
4. Nilai Prob. kepemilikan institusional (KINS) lebih tinggi dari nilai Sig ($0,235 > 0,05$), sehingga hipotesis-4 “kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *integrated reporting*” **tidak diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Dewan Direksi terhadap *Integrated Reporting*

Isu yang mengemuka tentang bagaimana dampak operasi perusahaan akan mempengaruhi lingkungan alam dan sosial secara alami muncul di dalam organisasi. Berbagai dampak yang dimunculkan dari kegiatan operasi korporasi tersebut mengakibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) menjadi lebih sensitif terhadap permasalahan pemenuhan kewajiban korporasi terhadap lingkungan alam maupun sosial (Kustiani, 2017). Oleh karena itu, untuk memelihara dan menjaga kesinambungan usaha korporasi di masa mendatang, direksi sebagai pihak yang paling berpengaruh pada operasional perusahaan terutama dalam hal kebijakan dan pengambilan keputusan akan berusaha untuk mendorong pengungkapan dan pelaporan informasi terintegrasi terkait dengan tanggung jawab lingkungan alam dan sosial secara komprehensif dan transparan.

Adanya dewan direksi dapat membuat pengungkapan informasi entitas perusahaan melalui *integrated reporting* menjadi semakin meningkat. Besarnya ukuran dewan direksi dalam suatu entitas perusahaan mampu memengaruhi keputusan manajemen, meningkatkan kekuatan manajerial, dan dapat meningkatkan fokus terhadap pengungkapan informasi perusahaan. Artinya, perusahaan dengan lebih banyak direktur akan lebih mampu

meningkatkan keterbukaan pelaporan terintegrasi. Selain itu, dewan dengan jumlah anggota yang lebih besar lebih cenderung mempertimbangkan opini publik ketika membuat keputusan bisnis daripada dewan dengan jumlah anggota yang lebih rendah (Abeysekera, 2010). Dengan demikian, direksi yang lebih besar dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan tindakan dan operasional perusahaan untuk kepentingan pemangku kepentingan, seperti pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan, karena meningkatnya fokus ke bidang-bidang tersebut (Suttipun & Bomlai, 2019).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wijaya dan Agustina (2021), Qashash et al (2019), serta Mawardani dan Harymawan (2021), penelitian ini menemukan bahwa direksi yang lebih besar merupakan indikator tata kelola perusahaan yang lebih baik, yang pada hasilnya berdampak positif dan signifikan terhadap *integrated reporting*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Integrated Reporting*

Komisaris independen mempunyai tugas dalam mengawasi kebijakan pengurusan jalannya pengelolaan, baik yang berkaitan dengan perusahaan, kegiatan bisnis perusahaan maupun pemberian saran kepada dewan direksi. Oleh karena itu, komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada pelaporan terintegrasi karena hanya bertanggung jawab penuh untuk mengawasi dewan direksi dalam perannya sebagai pelaksana atau manajer manajemen korporasi (Qashash et al., 2019).

Minimal 30% komisaris perusahaan harus independen agar dapat mematuhi peraturan No. 57/POJK.04/2017 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Namun, jumlah komisaris yang independen hanya berfungsi untuk pemenuhan syarat-syarat dan bahwa bisnis memenuhi tanggungjawabnya dalam hal tata kelola perusahaan (Adiwibowo & Ifnapiya, 2020). Ketika ada lebih sedikit komisaris independen daripada anggota dewan komisaris, tanggung jawab pengawasan dan pengambilan keputusan komisaris independen menjadi melemah/tidak efektif. Ketidakefektifan fungsi pengawasan tersebut mengakibatkan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan menjadi tidak menyeluruh dan akan berpengaruh pada tingkat pengungkapan informasi yang berkaitan dengan keseluruhan aktivitas perusahaan melalui *integrated reporting* (Ahmad & Sari, 2017).

Studi sebelumnya oleh Adiwibowo & Ifnapiya (2020), Mandalika et al., (2020), Qashash et al. (2019), dan Ahmad & Sari (2017) semuanya menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berdampak pada pelaporan terintegrasi, oleh karena itu temuan ini konsisten.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Integrated Reporting*

Komite audit bertugas memberikan nasihat kepada komisaris mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan, memeriksa kebenaran laporan manajemen, dan mendukung pekerjaan manajemen supaya dapat melakukan pekerjaan dengan baik (Hapsari et al., 2019). Dengan melakukan tugasnya, komite audit dapat mengoptimalkan *monitoring* terhadap performa manajemen sehingga kinerja manajemen menjadi efektif dan efisien serta dapat memberikan dorongan meningkatkan dalam pengungkapan informasi secara komprehensif dan transparan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau *stakeholder*. Dengan demikian, komite audit dapat mendorong publikasi *integrated reporting* sehingga dapat mewujudkan dan menumbuhkan nilai perusahaan.

Tata kelola perusahaan dapat didorong oleh sistem pemantauan komite audit. Agar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat terwujud, organisasi perusahaan perlu menggunakan mekanisme pengawasan, seperti komite audit. Dengan demikian, komite audit dapat memberikan kredibilitas terhadap gagasan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik tata kelola perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengarahkan dan mendorong pelaku usaha untuk mengungkapkan dan menyampaikan informasi yang lengkap dan terbuka dalam pelaporan perusahaan sesuai dengan standar pelaporan yang terintegrasi (Purbandari et al.,

2018). Banyak peneliti sampai pada kesimpulan yang sama dengan Ahmad & Sari (2017), Kurnianto et al., (2020), Mandalika et al., (2020), dan Hapsari et al., (2019): komite audit memiliki pengaruh positif dan besar terhadap *integrated reporting*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Integrated Reporting*

Tidak ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap pelaporan terintegrasi ini disebabkan karena kurang/rendahnya pemahaman pihak investor institusional dan *stakeholder* terkait dengan pentingnya penyampaian informasi yang lebih komprehensif dan transparan. Pelaporan perusahaan yang komprehensif dan transparan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dan pihak institusional guna berinvestasi pada korporasi tersebut. Selain itu, pihak investor institusional lebih fokus hanya pada satu jenis laporan yaitu laporan mengenai kinerja keuangan, dimana laporan keuangan tersebut menjadi penentu dan bahan pertimbangan yang utama dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

Fokus utama *stakeholders* dan pihak investor institusional dalam pengambilan keputusan berinvestasi adalah terletak pada besarnya laba. Hal tersebut disebabkan karena besarnya laba berkaitan erat dengan *return* dari investasi dan pengambilan keputusan investasi mengabaikan berbagai aspek lainnya diluar laba yang dapat mempengaruhi perusahaan seperti *corporate social responsibility*, dan pengungkapan informasi yang bersifat sukarela sebagai salah satu kriteria pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan dan pihak investor institusional tidak mendesak korporasi untuk menyampaikan informasi yang lebih komprehensif dan transparan melalui pelaporan terintegrasi, sehingga korporasi pun akan berupaya guna bisa meningkatkan kinerja keuangan dan memaksimalkan keuntungan/laba untuk menarik *stakeholder* dibandingkan dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas (Sundari et al., 2020). Oleh karena itu, pelaporan terintegrasi tidak terpengaruh oleh besarnya kepemilikan suatu lembaga dalam suatu perusahaan.

Studi sebelumnya oleh Novaridha (2017), Qashash et al., (2019), Adiwibowo & Ifnapiya (2020), dan Sundari et al. (2020), yang semuanya meneliti dampak kepemilikan institusional pada pelaporan terintegrasi, semuanya mencapai kesimpulan yang sama: kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada pelaporan terintegrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berikut dari hasil tes penelitian, dapat menarik kesimpulan berikut:

1. Dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *integrated reporting*.
2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *integrated reporting*.
3. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *integrated reporting*.
4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *integrated reporting*.

Keterbatasan Penelitian

Direksi, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional merupakan empat faktor independen yang diuji dalam penelitian ini, dan variabel lainnya tidak berpengaruh pada hasil penelitian ini. Selain itu, waktu penelitian untuk penelitian ini hanya tiga tahun, dari 2018 hingga 2020, dan hanya berfokus pada bisnis pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, tidak mungkin tergeneralisasi temuan penelitian ini ke sektor industri lain.

Saran

Peneliti dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian di masa depan berdasarkan keterbatasan literatur yang ada, seperti harapan bahwa penelitian di masa depan akan menggunakan variabel moderasi, kemungkinan menggunakan variabel bebas lain selain yang terkandung dalam penelitian ini, atau penambahan beberapa variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi pelaporan terintegrasi. Hal-hal termasuk kepemilikan manajemen perusahaan, profitabilitas dan umur perusahaan. Selain itu, berbagai proxy pengukuran lainnya kemungkinan akan digunakan dalam studi mendatang. Diharapkan bahwa lebih banyak penelitian akan mengarah pada sector industri penelitian yang lebih luas, daripada hanya mengandalkan spesialisasi satu perusahaan. Selain itu, mungkin memperpanjang waktu/periode yang digunakan untuk penelitian untuk membuat cakupan penelitian menjadi lebih luas dan lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I. (2010). The influence of board size on intellectual capital disclosures by Kenyan listed firms. *Journal of Intellectual Capital*, 11(4), 504-518.
- Adiwibowo, A. S., & Ifnapiya, F. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka Integrated Reporting. *EkoPreneur*, 2(1), 76–92.
- Ahmad, R., & Sari, R. C. (2017). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran Kap Terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan Dengan Rerangka Integrated Reporting. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16654>
- Bags, C. (2017). Teori Teori dalam Pengungkapan Informasi CSR. *Academia*, 1–11.
- Bernardi, Cristiana and Stark, Andrew W. (2018). Environmental, social and governance disclosure, integrated reporting, and the accuracy of analyst forecasts. *British Accounting Review*, 50(1) pp. 16–31.
- Busco, C., Malafrente, I., Pereira, J., Starita, M.G. (2019). The determinants of companies' levels of integration: Does one size fit all?, *The British Accounting Review*, doi: <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.01.002>.
- Daromes, F. E., & Jao, R. (2020). Dewan Direksi Terhadap Reaksi Investor Mediation Role of Financial Performance on the Effect of. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 77–92.
- Dewi, A. S., Sari, D., & Abaharis, H. (2018). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Benefita*, 3(3), 445. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.3530>
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Ah Indonesia. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.498>
- Feng, T., Cummings, L., & Tweedie, D. (2017). Exploring integrated thinking in integrated reporting – an exploratory study in Australia. *Journal of Intellectual Capital*, 18(2), 330–353. <https://doi.org/10.1108/JIC-06-2016-0068>
- Freeman, R. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder's Approach*. Pitman. Boston. MA
- Gamerschlag, R., Möller, K., & Verbeeten, F. (2011). Determinants of voluntary CSR disclosure: Empirical evidence from Germany. *Review of Managerial Science*, 5(2-3), 233-262
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2018). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*, Semarang: Badan Penerbit-Undi
- Hapsari, D. W., Qashash, V., & Manurung, D. T. H. (2019). Implikasi Corporate Governance Dalam Pelaksanaan Integrated Reporting Pada Bumn Nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 537–549. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.31>

- Hartono, D. F., & Nugrahanti, Y. W. (2014). Pengaruh Mekanisme GCG terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 191–205.
- International Integrated Reporting Council's. (2013). *The International Framework*. UK: IIRC.
- Jensen, C.M dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*. Vol. 3, No.4 : 305-360
- Kılıç, M., & Kuzey, C. (2018). Determinants of forward-looking disclosures in integrated reporting. *Managerial Auditing Journal*, 33(1), 115–144. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2016-1498>
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kurnianto, A., Purwohedhi, U., & Prihatni, R. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Integrated Reporting. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing - JAPA*, 1(1), 16 - 30.
- Kustiani, N. A. (2017). Penerapan Elemen-Elemen Integrated Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Info Artha*, 3, 44–61. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i0.38>
- Lock, I., & Seele, P. (2016). *Corporate Governance : The International Journal of Business in Society CSR Governance and Departmental Organization : A Typology of Best Practices*.
- Mandalika, L., Hermanto, H., & Handajani, L. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Integrated Reporting dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 556. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p01>
- Mardiah, B. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Integrated Reporting. *Skripsi*.
- Martsila, I. S., & Meiranto, W. (2013). Pengaruh Corporate Governance terhadap Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip/ac.id/index/php/accounting>
- Mawardani, H. A., & Harymawan, I. (2021). The Relationship Between Corporate Governance and Integrated Reporting. *Journal of Accounting and Investment*, 22(1), 51–79. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.9694>
- Melania, V., & Dewi, A. S. (2014). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 66–75.

- Mujiani, S., & Jayanti. (2021). Analisis Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Report Pada Perusahaan Peserta Isra Di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Akuntansi* (Vol. 19, Issue 1, pp. 21–44).
- Mulyadi, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance terhadap kinerja keuangan. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 3(1).
- Novaridha, I. A. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Elemen-Elemen Integrated Reporting (Studi Pada Perusahaan Non-Kuangan yang listing di BEI Tahun 2015). *JOM Fekon*, Vol.4 No.1 (April).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57/PJOK 04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
- Permata, S., Mulyadi, J., & Supriyadi, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas terhadap Integrated Reporting dengan Audito Eksternal sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekobisman*, 4(3), 166–182.
- Poluan, G., & Nugroho, P. I. (2015). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Kondisi Financial Distress Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 39–56.
- Prawesti, D. A. D. (2019). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Komite Audit terhadap Integrated Reporting. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol.7 No.2
- Purbandari, Y., Suryani, R., & Ekonomi, J. I. (2018). *Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Reporting* 242 *FOKUS EKONOMI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING*. 242–254. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>
- Qashash, V., Hapsari, D. W., & ... (2019). Pengaruh Elemen-elemen Good Corporate Governance Terhadap Integrated Reporting (studi Empiris Pada Perusahaan Bumn Non-keuangan Yang Terdaftar Di *EProceedings* ..., 6(2), 3129–3140. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/10132%0Ahttps://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/download/10132/9988>
- Rahmawati, I.A., Rikumahu, Brady., dan Dillak, V. J. (2017). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan Corporate social responsibility Terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 2(2), 54–70.
- Situmorang, R., & Hadiprajitno, B. (2016). Pengaruh Karakteristik Dewan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Sustainability Reporting. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

- Sundari, U., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Umur Perusahaan terhadap Integrated Reporting. *Eksos*, 16(2), 95–109. <https://doi.org/10.31573/eksos.v16i2.169>
- Suttipun, M., & Bomlai, A. (2019). The relationship between corporate governance and integrated reporting: Thai evidence. *International Journal of Business and Society*, 20(1), 348–364.
- Utami, K. (2016). Disclosure dan Cost of Capital: Implementasi Integrated Reporting di Asia Pasifik. *Simposium Nasional Akuntansi, XIX, Lampung*, 1–23. [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX \(19\) Lampung 2016/makalah/059.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX (19) Lampung 2016/makalah/059.pdf)
- Utamie, D. N. (2021). Determinan Implementasi Integrated Reporting pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1442–1450.
- Vitolla F, Raimo N, Rubino M (2019). Board characteristics and integrated reporting quality: an agency theory perspective. <https://doi.org/10.1002/csr.1879>
- Wijaya, F., & Agustina, F. (2021). Pengaruh Elemen-Elemen Good Corporate Governance Terhadap Integrated Reporting. *TECHNOBIZ: International Journal of ...*, 4(2), 93–100. <https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/technobiz/article/view/1398%0Ahttps://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/technobiz/article/download/1398/728>
- Yulyan, M., Yadiati, W., & Aryonindito, S. (2021). The Influences of Good Corporate Governance and Company Age on Integrated Reporting Implementation. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 100. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31761>
- Yunizar, R. I., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 175–184.